

KONTRIBUSI BAHAN AJAR PKN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN NASIONALISME DI WILAYAH RAWAN KONFLIK

Musafir
(Universitas Jabal Ghafur Aceh)

Abstrak

Bahan ajar menjadi salah satu tonggak bagi keberhasilan pembelajaran, sebab melalui pengorganisasian bahan ajar ini, peserta didik akan ditransformasikan ilmu pengetahuan yang bermakna dan bernilai jika bahan ajar yang disampaikan memberikan pengalaman dan pengetahuan yang berarti bagi dirinya.

Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang rawan konflik sehingga rentan dengan disintegrasi bangsa, konflik GAM dan NKRI memberikan persepsi dan pemahaman yang berbeda diantara kedua belah pihak. Berkaca dari itu, Negeri ini harus tetap utuh menjadi bangsa dan Negara yang merdeka dan berdaulat itulah yang harus dijaga oleh generasi muda bangsa ini.

Setiap daerah memiliki nilai dan norma atau kearifan local yang menjadi kekayaan daerah itu untuk mengembangkan nilai dan kesadaran nasional dalam mewujudkan kokoh dan kuatnya bangsa dan Negara ini diatas Bhineka Tunggal Ika. Melalui pendidikan dan pembelajaran lah yang lebih efektif dalam upaya membangun nilai-nilai nasionalisme itu agar tidak tercerabut dalam akarnya.

Kata kunci : *Bahan ajar, nasionalisme, kearifan lokal*

LATAR BELAKANG

Konflik yang terus terjadi di wilayah Indonesia, terutama yang menjurus pada disintegrasi bangsa sudah lama terjadi, terutama di provinsi Aceh, Maluku dan Papua. Terjadinya konflik tersebut apabila dilihat dari tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU No. tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Dari uraian tujuan pendidikan nasional tersebut, jelas bahwa tujuan pendidikan nasional tersebut merupakan suatu premis dalam rangka kegiatan yang menciptakan putra-putri Indonesia untuk menjadi warganegara yang selalu berfikir dan bertindak untuk kepentingan bangsa dan Negara, dan bukan untuk kepentingan kelompok atau suku mereka tertentu. Namun dalam realita dewasa ini, terlihat bahwa kepentingan nasional sudah dikesampingkan, sehingga bangsa ini selalu dirongrong dari dalam untuk mencapai tujuan

dan keinginan segelintir kelompok tertentu, seperti yang terjadi pada konflik Aceh, Maluku dan Papua.

Desentralisasi juga telah mendorong bangsa ini menjadi bangsa yang primordialisme, individualism dan fanatisme sehingga kecenderungan terjadinya konflik semakin marak dimana-mana. Aceh yang sejak dulu menjadi wilayah yang rawan konflik bukan hanya menyangkut masyarakat tetapi juga menyangkut pemerintahan, konflik pemerintah dengan GAM, konflik antar kelompok merupakan warna yang sampai saat ini masih menghinggapinya masyarakat Aceh. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka perlu dibangun kembali kesadaran masyarakat yang tinggi akan realita masyarakat majemuk atau multikultur serta kesadaran akan identitas kebangsaannya di tengah-tengah pluralism ini melalui pendidikan.

Nilai-nilai luhur budaya yang dimiliki kelompok masyarakat di Indonesia sudah merupakan milik bangsa sebagai potensi yang tak ternilai harganya untuk pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk baik dari segi budaya, agama, maupun bahasa yang memiliki nilai-nilai luhur sebagai *local wisdom*-nya. Menurut Alwasilah (2009: 50) "Ada sejumlah praktik pendidikan tradisional (*etnodidaktik*) yang terbukti ampuh, seperti pada masyarakat adat Kampung Naga dan Baduy dalam melestarikan lingkungan". Namun, sebenarnya secara keseluruhan masyarakat adat yang ada telah menyelenggarakan pendidikan yang dapat disebut sebagai pendidikan tradisi, termasuk pendidikan budi pekerti secara baik.

Ada kaitan yang erat antara pendidikan dengan kebangkitan suatu bangsa. Tumbuhnya kesadaran baru atau perubahan-perubahan di suatu negara dipastikan dipelopori oleh kaum muda terpelajar. Jatuhnya rezim orde baru dan kebangkitan era reformasi di Indonesia dimotori oleh kaum muda terpelajar. Hal ini menunjukkan betapa besar kontribusi pendidikan terhadap kebangkitan dan kemajuan suatu bangsa.

Pembelajaran PPKn berdasarkan Peraturan Mendiknas No. 22 tahun 2006 merupakan salah satu mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945, tetapi apabila kita melihat dari fenomena yang tersaji di depan mata kita dewasa ini terkesan bahwa PPKn "belum berhasil" mencapai tujuan tersebut, sehingga dalam konteks ini terdapat ketidak-seimbangan antara apa yang dicita-citakan oleh undang-undang (*Das Solen*) dengan apa yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*Das Sain*).

PKn tersebut akan dapat tercapai apabila hasil belajar PKn mampu menginternalisasikan nilai-nilai etika dan moral, kemanusiaan, dan nilai-nilai kerjasama, dan demokratis terhadap peserta didik. Untuk itu kemampuan guru PKn dituntut untuk mengembangkan nilai-nilai tersebut. Guru cukup strategis posisinya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Perkembangan kemajuan ilmu dan teknologi yang begitu cepat, pergaulan umat manusia yang mengglobal tidak akan membawa kesejahteraan, kedamaian untuk kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini manakala nilai-nilai sosial tidak terinternalisasi dengan baik. Guru PKn menjadi tumpuan harapan dan cukup strategis dalam mengembangkan nilai-nilai tersebut melalui bahan ajar.

Bahan belajar merupakan sarana bagi pengembangan materi ajar yang akan disampaikan, oleh sebab itu kedudukan guru sebagai pengembang bahan ajar dituntut memiliki kreativitas dalam pengembangan bahan ajar agar hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai dengan maksimal. Bahan ajar PKn akan efektif bagi pengembangan nilai-nilai nasionalisme peserta didik sebab di dalamnya sangat kental dan terkait dengan pendidikan karakter bangsa.

Berdasarkan paparan tersebut, maka bahan ajar harus diorganisasikan guru dalam meningkatkan pemahaman nasionalisme yang bisa dipadukan dengan nilai-nilai kearifan local yang telah berkembang selama ini. Nilai kearifan local akan membantu siswa mengenali nilai-nilai moral dan perilaku yang akan mampu memberikan kontribusi bagi kearifan bangsa ini.

Tulisan ini berangkat dari kajian penulis terhadap semakin mudarnya nasionalisme dan karakter bangsa oleh karena pendidikan secara umum tidak terimplementasi secara baik dalam tatanan nilai peserta didik. Melalui tulisan ini diharapkan memberikan kontribusi bahwa bahan ajar akan sangat membantu meningkatkan nasionalisme peserta didik dengan menginternalisasi nilai-nilai kearifan local.

HAKEKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Nu'man Somantri dalam Hidayat, K dan Azra, A (2008:6) menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan atau civics (civics education) adalah sebagai ilmu kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan : (a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan terorganisasi (Orsospolek), (b) individu-individu dengan negara. Sementara Edmonson (1958) menyatakan bahwa civics selalu didefinisikan sebagai sebuah

studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak dan hak-hak istimewa warga negara.

Azra (2008:7) memberikan definisi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM karena mencakup kajian dan pembahasan tentang banyak hal, seperti pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, rule of law, hak dan kewajiban warga Negara, proses demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan warga Negara dalam masyarakat madani, pengetahuan tentang lembaga-lembaga dan system yang terdapat dalam pemerintahan, politik, administrasi public dan system hokum, pengetahuan tentang HAM, kewarganegeraan aktif dan sebagainya.

Selanjutnya Somantri, dalam Hidayat dan Azra (2008:8) menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di tandai oleh cirri-ciri sebagai berikut :

- a) Civic education adalah kegiatan yang meliputi seluruh program sekolah;
- b) Civic education meliputi berbagai macam kegiatan mengajar yang dapat menumbuhkan hidup dan perilaku yang lebih baik dalam masyarakat demokratis;
- c) Dalam civic education juga menyangkut pengalaman, kepentingan masyarakat, dan syarat-syarat objektif untuk hidup bernegara.

Konsep civics education menurut Cogan (1999:4) secara umum menunjuk pada “...*the kinds of course work taking place within the context of the formalized schooling structure*” seperti “civics” di kelas Sembilan dan “*problem of Democracy*” di kelas 12. Dalam posisi ini menurut Cogan, *civics education* diperlakukan sebagai “...*the foundational course work in school yang dirancang untuk mempersiapkan ...young citizens for an active role in their communities in their adult lives*”.Ini memiliki arti bahwa “*civic education*” merupakan mata pelajaran dasar yang dirancang untuk mempersiapkan warga Negara muda untuk melakukan peran aktif dalam masyarakat kelak setelah meraka dewasa nanti.

Berdasarkan kajian pemaknaan di atas, sangat jelas sekali bahwa orientasi dari pendidikan kewarganegaraan dalam wacana Indonesia atau *civic education; citizenship education* merupakan pendidikan yang berorientasi pada upaya pembentukan warganegara yang baik, yaitu mempersiapkan para warga muda agar menjadi warga yang mampu berpartisipasi yang baik dalam kehidupan masyarakat di kemudian hari.

Dalam wacana pendidikan di Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan (*Citizenship*) merupakan matapelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warganegara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Kurikulum Berbasis Kompetensi, 2004). Pendidikan Kewarganegaraan

mengalami perkembangan sejarah yang sangat panjang, yang dimulai dari *Civic Education*, Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sampai yang terakhir pada Kurikulum 2004 berubah namanya menjadi matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik sebagai individu, anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Landasan PKN adalah Pancasila dan UUD 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, tanggap pada tuntutan perubahan zaman, serta Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kurikulum Berbasis Kompetensi tahun 2004 serta Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan Penilaian Mata Pelajaran Kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum.

KONSEP PENGEMBANGAN KESADARAN BERBANGSA BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Sejarah menunjukkan, masing-masing etnis dan suku memiliki kearifan lokal sendiri. Misalnya saja (untuk tidak menyebut yang ada pada seluruh suku dan etnis di Indonesia), suku Batak kental dengan keterbukaan, Jawa nyaris identik dengan kehalusan, suku Madura memiliki harga diri yang tinggi, dan etnis Cina terkenal dengan keuletan. Lebih dari itu, masing-masing memiliki keakraban dan keramahan dengan lingkungan alam yang mengitari mereka. Kearifan lokal itu tentu tidak muncul serta-merta, tapi berproses panjang sehingga akhirnya terbukti, hal itu mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka. Keterujiannya dalam sisi ini membuat kearifan lokal menjadi budaya yang mentradisi, melekat kuat pada kehidupan masyarakat. Artinya, sampai batas tertentu ada nilai-nilai perenial yang berakar kuat pada setiap aspek lokalitas budaya ini. Semua, terlepas dari perbedaan intensitasnya, mengeram visi terciptanya kehidupan bermartabat, sejahtera dan damai. Dalam bingkai kearifan lokal ini, masyarakat bereksistensi, dan berkoeksistensi satu dengan yang lain.

Masyarakat Indonesia sudah sepatutnya untuk kembali kepada jati diri mereka melalui pemaknaan kembali dan rekonstruksi nilai-nilai luhur budaya mereka. Dalam kerangka itu, upaya yang perlu dilakukan adalah menguak makna substantif kearifan lokal. Sebagai misal, keterbukaan dikembangkan dan kontekstualisasikan menjadi kejujuran dan

seabreg nilai turunannya yang lain. Kehalusan diformulasi sebagai keramahtamahan yang tulus. Harga diri diletakkan dalam upaya pengembangan prestasi; dan demikian seterusnya. Pada saat yang sama, hasil rekonstruksi ini perlu dibumikan dan disebarluaskan ke dalam seluruh masyarakat sehingga menjadi identitas kokoh bangsa, bukan sekadar menjadi identitas suku atau masyarakat tertentu. Untuk itu, sebuah ketulusan, memang, perlu dijadikan modal dasar bagi segenap unsur bangsa. Ketulusan untuk mengakui kelemahan diri masing-masing, dan ketulusan untuk membuang egoisme, keserakahan, serta mau berbagi dengan yang lain sebagai entitas dari bangsa yang sama.

Para elit di berbagai tingkatan perlu menjadi garda depan, bukan dalam ucapan, tapi dalam praksis konkret untuk memulai. Kearifan lokal yang digali, dipoles, dikemas dan dipelihara dengan baik bisa berfungsi sebagai alternatif pedoman hidup manusia Indonesia dewasa ini dan dapat digunakan untuk menyaring nilai-nilai baru/asing agar tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa dan menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Sang Khalik, alam sekitar, dan sesamanya (*tripita cipta karana*). Dan sebagai bangsa yang besar pemilik dan pewaris sah kebudayaan yang adiluhung pula, bercermin pada kaca benggala kearifan para leluhur dapat menolong kita menemukan posisi yang kokoh di arena global ini.

Persoalannya adalah bagaimana mengimplementasikan kearifan lokal untuk membangun pendidikan karakter di sekolah? Oleh karena itu, perlu ada revitalisasi budaya lokal (kearifan lokal) yang relevan untuk membangun pendidikan karakter. Hal ini dikarenakan kearifan lokal di daerah pada gilirannya akan mampu mengantarkan siswa untuk mencintai daerahnya. Kecintaan siswa pada daerahnya akan mewujudkan ketahanan daerah. Ketahanan daerah adalah kemampuan suatu daerah yang ditunjukkan oleh kemampuan warganya untuk menata diri sesuai dengan konsep yang diyakini kebenarannya dengan jiwa yang tangguh, semangat yang tinggi, serta dengan cara memanfaatkan alam secara bijaksana.

Dalam konteks tersebut di atas, kearifan lokal menjadi relevan. Anak bangsa di negeri ini sudah sewajarnya diperkenalkan dengan lingkungan yang paling dekat di desanya, kecamatan, dan kabupaten, setelah tingkat nasional dan internasional. Melalui pengenalan lingkungan yang paling kecil, maka anak-anak kita bisa mencintai desanya. Apabila mereka mencintai desanya mereka baru mau bekerja di desa dan untuk desanya. Kearifan lokal mempunyai arti sangat penting bagi anak didik kita. Dengan mempelajari kearifan lokal anak didik kita akan memahami perjuangan nenek moyangnya dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. (<http://koleksi-skripsi.blogspot.com/teori-pembentukan-karakter.html> diunduh 01/01/12.). Nilai-nilai kerja keras, pantang mundur, dan

tidak kenal menyerah perlu diajarkan pada anak-anak kita. Dengan demikian, pendidikan karakter melalui kearifan lokal seharusnya mulai diperkenalkan oleh guru kepada para siswanya. Semua satuan pendidikan siswanya memiliki keberagaman ras maupun agama, dapat menjadi laboratorium masyarakat untuk penerapan pendidikan karakter. Proses interaksi yang melibatkan semua pihak dalam kearifan lokal sama saja mempelajari karakteristik dari materi yang dikaji sehingga siswa secara langsung dapat menggali karakter peristiwa kelokalan itu.

Oleh karenanya kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai kebijaksanaan atau nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan-kekayaan budaya lokal berupa tradisi, petatah-petitih dan semboyan hidup (PR, Oktober 2004). Pengertian Kearifan Lokal dilihat dari kamus Inggris Indonesia, terdiri dari 2 kata yaitu kearifan (wisdom) dan lokal (local). Local berarti setempat dan wisdom sama dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain maka local wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dengan demikian membangun pendidikan karakter disekolah melalui kearifan lokal sangatlah tepat.

Hal ini dikarenakan Pendidikan berbasis kearifan lokal adalah pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk selalu dekat dengan situasi konkrit yang mereka hadapi sehari-hari. Model pendidikan berbasis kearifan lokal merupakan sebuah contoh pendidikan yang mempunyai relevansi tinggi bagi kecakapan pengembangan hidup, dengan berpijak pada pemberdayaan ketrampilan serta potensi lokal pada tiap-tiap daerah. Kearifan lokal milik kita sangat banyak dan beraneka ragam karena Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa, berbicara dalam aneka bahasa daerah, serta menjalankan ritual adat istiadat yang berbeda-beda pula. Kehadiran pendatang dari luar seperti etnis Tionghoa, Arab dan India semakin memperkaya kemajemukan kearifan lokal.

Pendidikan berbasis kearifan lokal dapat digunakan sebagai media untuk melestarikan potensi masing-masing daerah. Kearifan lokal harus dikembangkan dari potensi daerah. Potensi daerah merupakan potensi sumber daya spesifik yang dimiliki suatu daerah tertentu. Para siswa yang datang ke sekolah tidak bisa diibaratkan sebagai sebuah gelas kosong, yang bisa diisi dengan mudah. Siswa tidak seperti plastisin yang bisa dibentuk sesuai keinginan guru. Mereka sudah membawa nilai-nilai budaya yang dibawa dari lingkungan keluarga dan masyarakatnya. Guru yang bijaksana harus dapat menyelipkan nilai-nilai kearifan lokal mereka dalam proses pembelajaran. Pendidikan berbasis kearifan lokal tentu akan berhasil apabila guru memahami wawasan kearifan lokal itu sendiri. Guru yang kurang

memahami makna kearifan lokal, cenderung kurang sensitif terhadap kemajemukan budaya setempat. Hambatan lain yang biasanya muncul adalah guru yang mengalami lack of skill. Akibatnya, mereka kurang mampu menciptakan pembelajaran yang menghargai keragaman budaya daerah.

HAKEKAT NASIONALISME

Kesadaran nasional adalah berpikir kritis, rasional, dialektik, proaktif, dan holistik tentang hari depan bangsa berdasar pengalaman saat ini dan berdasar pengalaman masa lampau (Kartodirdjo: A:1955). Hakikatnya kesadaran nasional adalah kesadaran tentang sejarah bangsa, yaitu Bangsa Indonesia. Bung Karno mengatakan: “Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah”. Itu artinya sejarah sesuatu bangsa adalah ciptaan bangsa itu sendiri, bukan ciptaan bangsa lain. Kesadaran yang demikian menjadi dasar untuk membangun bangsa di hari depan yang lebih baik dari pada masa lalu dan masa kini.

Pengembangan kesadaran berbangsa mengandung makna membangun kembali pondasi nasionalisme kita (*Nation character building*). *Nation building* pada prinsipnya merupakan sebuah proses terus-menerus menuju terciptanya sebuah negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas dasar ideologinya. (Simatupang, 1980:18-23). Dengan kata lain, *nation building* merupakan proses pembentukan kesatuan bangsa yang utuh. Sementara itu, *nation* sendiri menunjuk pada suatu komunitas sebagai kesatuan kehidupan bersama yang mencakup berbagai unsur yang berbeda dalam aspek etnik, kelas atau golongan sosial, aliran kepercayaan, kebudayaan, linguistik, dan sebagainya. Kesemuanya terintegrasi dalam perkembangan historis sebagai kesatuan sistem politik berdasarkan solidaritas yang ditopang oleh kemauan bersama. Heterogenitas dalam berbagai segi kehidupan, unsur-unsurnya digembleng menjadi suatu homogenitas politik dan lazimnya terwujud sebagai negara nasional. Negara nasional itu sendiri menjadi wahana yang berfungsi untuk adaptasi, mempertahankan kesatuannya, memperkuat proses integrasinya serta mencapai tujuan eksistensinya. Negara nasional lebih efektif dan efisien dalam menopang eksistensi kelompok yang pluralistik dibanding sebagai komunitas lokal, regional, tribal, komunal, dsb. Jadi dalam perkembangan sebuah bangsa, proses integrasi menjadi isu sentral, artinya integrasi teritorial dan integrasi sosio-politik merupakan faktor dominan dalam mewujudkan unit nasional seperti sekarang ini. (Kartodirdjo, 1993:1-2).

Pengalaman masa lalu bagi Bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, Inggris, dan Jepang adalah kesalahan intern Bangsa Indonesia sendiri. Jika pada waktu itu kita sudah memiliki *tingkat kebudayaan* seperti Belanda, Inggris, dan Jepang, maka tidak mungkin

mereka mampu menjajah kita. Kebudayaan yang berupa ilmu, teknologi, dan tenaga ahli (termasuk keprajuritan atau kemiliteran) hakikatnya adalah *alat* yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan bisa dijadikan alat untuk menyengsarakan umat manusia khususnya melalui penjajahan bangsa atas bangsa lain.

Bagi kaum penjajah, menggunakan kebudayaan untuk menjajah bangsa lain adalah suatu kebanggaan. Karena mereka dapat menunjukkan keunggulannya (*cultural advantage*). Oleh sebab itu kaum penjajah memandang rendah bangsa yang dijajahnya, diperlakukan sebagai budak atau kuli. Bagi sebagian besar bangsa terjajah, tindakan kaum penjajah itu merupakan pelanggaran hak azasi manusia dan merupakan penghinaan, penghisapan, dan penindasan. Maka mereka bangkit melawannya. Tetapi ada sebagian kecil bangsa terjajah yang mendapatkan kenikmatan dari kaum penjajah ingin tetap melestarikan segala bentuk penjajahan di muka bumi ini. Hal yang demikian itu akan berlangsung sampai kapanpun selama eksistensi penjajahan itu masih bercocol di penjuru dunia ini. Kaum yang demikian lazim disebut sebagai “mitra” penjajah yang tugasnya adalah memberi informasi kepada penjajah, di mana informasi itu dipergunakan oleh kaum pejah untuk merencanakan penjajahan yang lebih canggih.

Nasionalisme atau kesadaran nasional didefinisikan sebagai kesadaran keanggotaan suatu bangsa yang secara bersama-sama mencapai, mempertahankan, mengisi kekuatan bangsa itu (Kartodirdjo:1999:10). Kesadaran nasional pertama kali setelah munculnya Budi Utomo dan penderitaan rakyat Indonesia yang dijajah oleh penjajah. Pengaruh perluasan kekuasaan kolonial, perkembangan pendidikan Barat, dan pendidikan islam terhadap munculnya nasionalisme Indonesia.

- a. Pengaruh perluasan kekuasaan kolonial Barat. Pada mulanya kolonial Barat hanya ingin mendominasi perekonomian lama kelamaan kolonial Barat menguasai politik dan ekonomi. Akibatnya seluruh politik dan ekonomi Indonesia dirampas oleh kolonial Barat. Penjajahan dan penindasan inilah yang menyebabkan kesadaran Bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajah dengan cara berjuang.
- b. Pengaruh perkembangan pendidikan Barat. Sejak abad ke-19 pemerintah Belanda secara lambat laun membuat sekolah-sekolah. pendidikan itu ternyata begitu menarik bagi pemuda Indonesia. Selain lembaga pendidikan kolonial ada juga lembaga pendidikan swasta yaitu Taman Siswa, Muhammadiyah, Missi, dan Zending. Lembaga-lembaga itulah yang kemudian menghasilkan tokoh2 nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

- c. Pengaruh pendidikan Islam. Sekolah-sekolah yang didirikan organisasi Islam seperti Muhammadiyah bersifat Modern karena proses pembaharuan namun masih bersifat islami. Artinya ilmu pengetahuan modern dipadu dengan ajaran Islam.

UPAYA MEMPERKUAT NASIONALISME MELALUI PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI WILAYAH RAWAN KONFLIK

TIDAK dapat dipungkiri, bahwa persoalan nasionalisme tidak akan selesai diperdebatkan dalam ruang dan waktu singkat. Indonesia sendiri masih terus bergerak untuk menemukan nasionalisme yang utuh, karena dibangun dari pondasi imajinasi, meskipun sudah disepakati sebuah nation sejak berpuluh-puluh tahun. Wajar, mengingat sebagai sebuah negara bangsa, Indonesia lahir dari beragam bangsa (etnisitas) yang sudah lama ada di Nusantara ini, mulai dari Aceh hingga Papua.

Melacak lebih mendalam tentang perasaan kebangsaan, maka akan muncul ke permukaan mengenai “siapa kita”. Di Sulawesi, ada suku Mandar (yang terkenal dunia maritimnya) tidak mau disebut orang Bugis maupun Makassar, meskipun sama-sama beradaptasi dalam satu wilayah. Begitupun di Jawa, orang Sunda, dan Madura tetap tidak akan mau dipanggil orang Jawa.

Di Aceh sendiri, suku-suku tertentu pun enggan menyebut dirinya Aceh dalam skala mikro. Dilihat dalam kacamata lebih makro, antara masyarakat yang hidup di Aceh bagian timur, dan barat-pun tetap membedakan dirinya. Identitas menjadi orang tertentu yang terkonstruksi dalam imajinasi kita adalah perasaan bangga untuk menjadi bagian dari bangsa yang kita yakini (primordial).

Kegundahan suku Gayo dan pesisir barat merespons “ekspansi identitas” adalah sebuah kewajaran dalam ranah sosial, dan budaya. Kesadaran nasionalisme muncul tatkala manusia mulai memahami, dan membatasi identitas dirinya berbeda dari komunitas lainnya. Perbedaan itu muncul dari sisi budaya (bahasa, adat istiadat, kesenian, sistem kepercayaan dan pola survive dengan lingkungannya).

Embrio nasionalis etnik akan tetap survive selama “klaim” atas dirinya berbeda dengan yang lain dipertahankan. Karena itu, kesadaran akan musuh bersama (etnik) muncul bila mengusik identitas “mereka”, hingga datang perasaan kebangsaan. Kasus Papua, misalnya, dalam tema yang sedikit menyentil maka akan muncul istilah “Demokrasi Kesukuan” (lihat: Sem Karoba dkk, 2010).

Pada tataran politik, maka kondisi apa yang sedang terjadi di Aceh akan dimaknai secara beragam oleh berbagai kalangan. Sisi kultural yang seharusnya mampu melihat ini

lebih mendalam tidak muncul, karena ditekan oleh kekuatan politik yang menyeret argumen sejarah sebagai simbol kekuatan untuk melegalkan sebuah tujuan.

Pada sisi kultural sebenarnya etnisitas menjadi perhatian utama, karena dia menyangkut dengan budaya, dan identitas sebuah komunitas yang hidup sepanjang sejarah. Etnisitas tidak akan pernah berhenti mereproduksi simbol budayanya untuk memperoleh keadilan dari pihak yang menang.

Embrio nasionalisme etnik itu muncul, tatkala konsep Qanun Wali Nanggroe yang baru disahkan di Aceh dianggap tidak mengakomodir sub-etnik yang juga hidup di Aceh. Kondisi ini telah membangkitkan kesadaran nasionalisme mereka (sub-etnik Aceh) yang ikut merasakan penderitaan selama masa konflik. Mereka yang juga merasa bagian dari Aceh, menuntut pengakuan identitas kebangsaan (Aceh) oleh “orang Aceh” yang mendominasi teritorial Serambi Mekkah ini. Pengakuan identitas tersebut setidaknya ikut melibatkan simbol budaya mereka ke dalam wilayah kekuasaan “monarki” baru (Wali Nanggroe).

Gayo menjadi suku yang pertama sekali memunculkan semangat nasionalisme etniknya. Bila melihat catatan budaya yang terselip, dan kembali menarik garis sejarah. Saat Snouck Hurgronje menulis deskripsi tentang Aceh, maka sepertinya si Abdul Gaffar telah menulis satu buku yang terpisah dari yang lain mengenai keberadaan masyarakat di tengah-tengah Aceh tersebut. Bagi sastrawan Belanda itu, Gayo menjadi perbincangan tersendiri yang menarik untuk dilihat budayanya yang tetap survive, dan hidup di tengah Aceh. Apalagi masyarakat Gayo juga ikut terlibat aktif dalam mempertahankan Aceh dari penjajah hingga masa konflik.

Pada diskusi ini, saya tidak tertarik untuk menarik kasus ini dalam ranah politik yang penuh kompetisi. Saya ingin melihat dalam tataran sosial, dan budaya mengapa embrio etnisitas itu tetap hidup meskipun dalam ranah demokrasi. Antara Aceh, dan sub-etniknya dalam teritorial tersebut, antara Aceh dan saudara-saudaranya yang hanya dibatasi oleh garis batas bahasa dan simbol adat.

Merunut pada realitas di lapangan bahwa ada perubahan arah “musuh bersama” dari vertikal ke horizontal, tapi masih pada tataran konflik etnik (antara Aceh dan Jakarta beralih pada antara Aceh dan sub-etniknya). Lebih mendalam kondisi ini tidak jauh berbeda dengan permasalahan wilayah *imagined community* yang pernah ditulis oleh Anderson (lihat: Anderson, 2008).

Dalam teorinya G. Kellas (dalam Bangun Tambunan Nasionalisme Etnik: Kashmir dan Quebec, 2004) menyebutkan pada dasarnya ada tiga perspektif nasionalisme (primordial,

kontekstual, dan konstruktif). Bila dieksplorasi tiga persepektif ini, maka sebenarnya semangat etnisitas itu adalah semangat yang diwarisi oleh sejarah mereka (melalui simbol-simbol budaya).

Simbol budaya yang mereka miliki kemudian dibenturkan oleh kondisi perkembangan modern seperti menghadapi ketidakadilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya yang dianggap sudah teraneksasi akibat kompetisi antara yang menang dan kalah. Pada tahapan akhir nasionalisme ini menguat karena ada aktor yang berperan mengkonstruksi kembali nasionalisme, untuk menggerakkan semangat etnisitas mereka.

Aceh sebagai kelompok (etnis) yang menang dalam proses aneksasi menurut perjalanan sejarah, tidak bisa melupakan begitu saja sub-nasionalisme (etnisitas) lain yang hidup dalam teritorial mereka. Setidaknya, aktor Aceh harus melakukan upaya-upaya merangkul kembali, atau mengkontruksi sebuah kesadaran kolektif betapa pentingnya kesatuan Aceh sebagai sebuah nasionalisme, dan sub etnisnya. Tentunya, kita tidak mengharapkan adanya perpecahan dalam wilayah yang penuh nuansa sejarah ini. Mengedepankan sisi budaya dalam menyelesaikan kasus antarkomunitas yang mendiami Aceh, cenderung akan menemukan solusi yang bijak.

Selain itu, kita juga harus memahami, bahwa bahasa telah menjadi simbol utama penegas etnisitas, bahasa sangat sensitif dalam arena setting sosial, dan budaya yang mulai dimasuki politik kemudian hari. Bagaimanapun, peran produk industri telah ikut memperkuat komunikasi etnis, sehingga tatkala ada aktor lain yang mengkonstruksinya maka nasionalismenya bangkit. Sedikit saja para aktor sosial, dan politik memahami posisi kultural, maka riak konflik tidak akan terjadi. Tentunya sampai kiamat, Aceh tetap dalam satu bingkai, bukan tiga bingkai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, Kusnaka . (2005). *Budaya Tradisional Dan Lokal Di Tengah Multikultural Nasional Dan Arus Globalisasi*. (online). Tersedia: (<http://www.forum-rektor.org/artikel.php?hal=3&no=11>). 5 September 2005.
- Budimansyah, D. (2010) *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*, Bandung: Widya Aksara Press.
- Budimansyah, D. (2009a) *Membangun Karakter Bangsa di Tengah Arus Globalisasi dan Gerakan Demokratisasi: Reposisi Peran Pendidikan Kewarganegaraan*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar UPI.
- Bhagwati, Jagdish. (2004). *In Defense of Globalization*. New York: Oxford University Press.

- Buwono X, Sultan Hamengku (2007) *Merajut kembali Keindonesiaan Kita*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cheng, Y.C. (1999). *Curriculum and Pedagogy in the New Century: Globalization, Localization and Individualization for Multiples Intellegences*. Bangkok: UNESCO-ACEID.
- Cogan, J.J., (1999), *Developing the Civic Society: The Role of Civic Education*, Bandung: [wwwCICED](http://www.CICED).
- Cogan, J.J. dan Derricott, R. (1998). *Citizenship for the 21st Century: an Internacional Perspectiva on Education*. London: Kogan Page.
- Creswell, John, 2008, *Educational Research, Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, Pearson Education, Inc upper Saddle River, New Jersey.
- Dianns Fia. (2001). *Otonomi Daerah dan Konflik Sosial*. [online] Tersedia: detik.com di <http://www.detik.com/kampus/gagasan/2001/01/2001111-145521.shtml>. (8 Oktober 2001)
- Djahiri, K. (1984). *Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral VCT dan Games dalam VCT*. Bandung: Laboratorium PMPKN IKIP Bandung.
- Djahiri, K. (2006). “Esensi Pendidikan Nilai-Moral dan PKn di Era Globalisasi” dalam *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI.
- Donald W. Robinson. 1967. *Promising Practices in Civic Education*. New York: National Council for the Social Studies.
- Franz Magnis Suseno. (2006). <http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/f/franz-magnis-suseno/index2.shtml>).25 Mei 2006.
- Fraenkel, J.R. (1977). *How to Teach about Values: An Analytic Approach*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Gagné, R. M. (1985). *The Conditions of Learning and Theory of Instruction*. (4th edition). New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Gerald A. Larue. (2006). *Human Values for the 21st Century*. (Online) Tersedia: <http://www.humanismtoday.org/vol12/larue.html>. 8 April 2006.
- Geisler, Norman (2001) *Resensi Buku :ETIKA KRISTEN: Pilihan dan Isu*, Malang :SAAT
- Greertz.C. (1992). *Tafsir Kebudayaan*. (Alih Bahasa oleh Fransisco Budi Hardiman). Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Harrison, Lawrence E. & Huntington, Samuel P. (Editors). (2000). *Culture Matters: How Values Shape Human Progress*. New York: Basic Books.
- Hermann, (1972). “Value Theory (Axiology)”. *The Journal of Value Inquiry* .VI, (3).163-184.

- Huntington, Samuel P. (2009) *Benturan Antar Peradaban Dan masa Depan Politik Dunia*, Diterjemahkan dari, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, oleh M. Sadat Ismail, Jakarta Qalam, Cet. 11.
- Kalidjernih, 2007. *Cakrawala Baru Kewarganegaraan*. Bogor. Regina.
- Kotter, P. (1955). *The New Rules How to Succeed in Today's Post-Corporate World*. New York: The Free Press.
- Kuhn, Thomas S. 2000. *The Structure of Scientific Revolution: Peran Paradigm dalam Revolusi Sains*. Penerjemah Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lickona, T. (1987). "Character development in the family" dalam *Character Development in Schools and Beyond*. New York: Praeger.
- Lickona, T. (1992). *Educating for Character: How our Schools can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Marzano, R.J. (1992). *A Different kind of classroom: Teaching with dimension of learning*. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Marzano, R. J. et al. (1988). *Dimension of thinking: A frame work for curriculum and instruction*. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Mikletwait, John & Wooldridge, Adrian.(2000). *A Future Perpect*. New York: Crown Publishers, Random House Inc.
- Mustofa Muchdhor, (2002). *Krisis Kemanusiaan dan Etika Global*. (Online). Tersdia: <http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-m/2002-October/000405.html>. 12 Oktober 2002.
- National Council for the Social Studies. (1994) *Curiculum Standards for Social Studies*. [Online] Tersedia : <http://www.socialstudies.org/standards/exec.html>. (26 september 2001)
- Robertson, R. (1992). *Globalization Social Theory and Global Culture*. London: Sage Publication.
- Sabatini, C.A., Bevis, G.G., Finkel, S.E. (1998). *The Impact of Civic Education Programs on Political Participation and Democratic Attitudes*. Calabasas: Center for Civic Education.
- Said Hamid Hasan.(1996). *Pendidikan Ilmu Sosial*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Stanley P. Wronski dan Donald H. Bragaw.(1986) *Sosial Studies and Sosial Science*. Washington: NCSS
- Soekarno. (1930). *Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan Bung Karno di Muka Hakim Kolonial Tahun 1930*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
- Somantri, Numan. 1975. *Metode Mengajar Civics*. Jakarta: Erlangga.

- Sumantri, Numan. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Rosda
- Superka, D.P. (1973). *A typology of valuing theories and values education approaches*. Doctor of Education Dissertation. University of California, Berkeley.
- Suryadi, Ace (2009) *Membangun Kompetensi SDM Yang mampu Bersaing di Era Global Melalui PKn (Masalah dan Tantangannya)*, Makalah disampaikan pada Seminar Pendidikan Kewarganegaraan, UPI, Bandung, tgl 12 Desember 2009.
- Suwardi, Herman, (2004) *Roda Berputar Dunia Bergulir*, Bandung, Bakti Mandiri.
- UNESCO-APNIEVE.(2000), *Belajar untuk Hidup Bersama dalam Damai dan Harmoni: Pendidikan Nilai untuk Perdamaian, Hak-hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan Pembangunan Berkelanjutan untuk Kawasan Asia-Pasifik*, Buku Sumber UNESCO-APNIEVE untuk Pendidikan Guru dan Jenjang Pendidikan Tinggi, Kantor Prinsipal UNESCO untuk Kawasan Asia Pasifik, Bangkok dan Universitas Pendidikan Indonesia.
- The International Commision on Education for the Twenty-First Century. (1996). *Learning: The Treasure Within*, Report to UNESCO of The International Commision on Education for the Twenty-First Century.
- Wahab, Abdul Azis (2009) *Memantapkan Kembali jatidiri Bangsa Dalam Rangka Penguatan Dasar-Dasar Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar Pendidikan Kewarganegaraan, UPI, Bandung, tgl 12 Desember 2009.
- Wahab, Abdul Azis, (2001). *Perubahan dan Ketidak Pastian (Tantangan Utama Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial)*. Makalah. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Welton & Malan, (1988) *Children and Their World*. Boston: houghton Mifflin
- World Commission on the Social Dimension of Globalization. (2004). *A Fair Globalization: Creating Opportunities for All*. New York: ILO Publication.
- Winataputra, Udin (2008) *Multikulturalisme-Bhineka Tunggal Ika Dalam Perspektif PKN Sebagai Wahana Pembangunan Karakter bangsa Indonesia.*, dalam "Acta Civicus, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana UPI., Volume 2, No. 1 Oktober 2008.
- Winataputra, Udin dan Budimansyah (2007) *Civic Education Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas.*, Bandung Program Studi pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.